



**STANDAR PELAYANAN DAN
STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR
PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA
2023**

**DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LOMBOK UTARA**



BUPATI LOMBOK UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 178 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN
LOMBOK UTARA**

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Utara perlu ditindaklanjuti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Utara;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
17. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Utara.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang memuat komponen sebagai berikut :

- a. dasar hukum;
- b. persyaratan;
- c. sistem, mekanisme dan prosedur;
- d. jangka waktu penyelesaian;
- e. biaya tarif;
- f. produk pelayanan;
- g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
- h. kompetensi pelaksana;
- i. pengawasan internal;

- j. penanganan Pengaduan, saran, dan masukan;
- k. jumlah pelaksana;
- l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
- m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan; dan
- n. evaluasi kinerja pelaksanaan.

KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman/petunjuk tertulis dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang aman, nyaman, cepat, akuntabel dan konsekuen yang memuat komponen sebagai berikut :

- a. nomor standar operasional prosedur;
- b. tanggal pembuatan;
- c. tanggal revisi;
- d. tanggal pengesahan;
- e. disahkan oleh;
- f. nama standar operasional prosedur;
- g. dasar Hukum;
- h. kualifikasi pelaksana;
- i. keterkaitan;
- j. peralatan dan perlengkapan;
- k. peringatan;
- l. pencatatan dan pendataan
- m. uraian prosedur;
- n. pelaksana;
- o. kelengkapan;
- p. waktu; dan
- q. output.

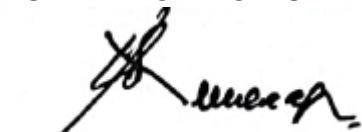
KEEMPAT : Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Utara.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung
pada tanggal : 16 Juni 2023

BUPATI LOMBOK UTARA,



H. DJOHAN SJAMSU., SH



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA**

Jalan Raya Tanjung Tioq Tata Tunaq

website: disnakerpmpstsp.lombokutara.go.id e-mail: dtkpmpstspklu@gmail.com Kode Pos: 83350

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN SATU
PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR: 067.45/267.a/DPMPTSPTK/2023**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN
LOMBOK UTARA**

KEPALA DINAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan diktum KEEMPAT Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor 503- 236/I/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan An Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Utara, Standar Pelayanan Dan Standar Operasional Prosedur Disusun Dan Ditetapkan Dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Utara;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Utara perlu ditindaklanjuti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Standar Pelayanan Dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);

13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
16. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor 69);
17. Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 503-236/I/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan Dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Utara sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan Dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- KETIGA** : Standar Pelayanan Dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempedomani Maklumat Pelayanan yaitu melayani sepenuh hati tanpa memungut biaya diluar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Setiap unit pelaksana Penyelenggaraan Perizinan Berusaha bertanggungjawab melaksanakan Pelayanan pada unit masing-masing;
- KELIMA** : Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali dan dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Utara;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada Tanggal : 5 Juni 2023

KEPALA DINAS,



EVI WINARNI, SP.,M.Si
Pembina Tk (IV/b)
NIP. 19770513 200212 2 008

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Lombok Utara

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Dan
Standar Operasional Prosedur
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Pada Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga
Kerja Kabupaten Lombok Utara.

**STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LOMBOK UTARA**

I. PENDAHULUAN

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Utara telah diberikan Pendelegasian Kewenangan berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Utara dengan Penetapan Standar Pelayanan melalui Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : Tentang Penetapan Standar Pelayanan Dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Utara.

II. MOTTO PELAYANAN

Motto adalah semboyan yang merupakan cerminan jiwa, semangat dan tekad yang menjadi dasar langkah dan gerak segenap aparatur pelayanan. Adapun Motto Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Utara adalah “**Santun, Akuntabilitas, Nyaman, Gemilang, Gratis, Unggul, Profesional (SANGGUP)**”

III. JANJI PELAYANAN

1. Melayani sesuai persyaratan dan prosedur tetap pelayanan, berdasarkan ketentuan yang berlaku;
2. Tidak melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam memberikan pelayanan;
3. Pengguna layanan dapat mengajukan keluhan atau keberatan apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pengguna layanan akan mendapat jawaban resmi dari pemberi layanan;
4. Kesalahan atau kekeliruan keterangan dalam produk pelayanan yang diakibatkan kesalahan teknis oleh penyedia layanan, maka penyedia layanan akan memperbaiki layanan tersebut tanpa memungut biaya tambahan;
5. Menyediakan dan melayani informasi yang berkaitan dengan tahapan proses Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan yang berlaku.

IV. MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat Pelayanan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

“ Dengan ini Kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, tegurlah kami melalui unit pengaduan dan kami siap diberikan sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku”

V. RUANG LINGKUP TUGAS

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerjamerupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penyelenggara penunjang urusan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten Lombok Utara yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

VI. STANDAR PELAYANAN

Dokumen Standar Pelayanan Dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Utara disusun berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Utara, sebagai berikut :